

## BAB V

### KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

#### 5.1 Kesimpulan

Penerapan Indeks Desa Membangun (IDM) di Kabupaten Kebumen secara tegas mengonfirmasi kesesuaian konsep *governmentality* ala Michel Foucault, di mana kekuasaan beroperasi bukan hanya sebagai dominasi langsung, melainkan melalui pengaturan norma, standar, dan mekanisme administrasi yang secara sistematis mengendalikan tata kelola serta perilaku desa. IDM berfungsi sebagai instrumen strategis yang menormalisasi desa sesuai kebijakan pembangunan nasional, menjadikan desa subjek yang harus tunduk pada regulasi normatif dari pemerintah pusat. Mekanisme ini memperlihatkan bagaimana pemerintah pusat menggunakan instrumen formal untuk mengarahkan desa agar memenuhi standar yang ditetapkan, menggambarkan sifat tersebar dan halus dari kekuasaan modern dalam prakteknya.

Namun, memperhatikan analisis Tania Murray Li, penerapan IDM mengandung kontradiksi kunci yang mencuat di lapangan. Indikator dan rumusan kebijakan IDM yang bersifat teknokratis dan top-down gagal menangkap keragaman kebutuhan dan kondisi desa yang sangat bervariasi. Pendekatan ini menimbulkan ketegangan antara otonomi pemerintahan desa dan kendali birokrasi pusat yang memaksa penyesuaian dengan ukuran administratif, tanpa ruang adaptasi atau inovasi lokal. Data empiris di Kebumen menunjukkan rumusan IDM yang terlalu normatif dan teknis tidak mencerminkan kewenangan desa secara nyata, yang berdampak pada penolakan sebagian desa terhadap rumusan IDM yang tidak terakomodasi dalam perencanaan desa mereka.

Selanjutnya, tantangan nyata implementasi IDM untuk mendukung pencapaian RPJPN dan RPJMN di Kebumen juga terletak pada lemahnya koordinasi antar lembaga pemerintah, termasuk kementerian, dinas kabupaten, dan pemerintahan desa. Ketidakterpaduan ini menciptakan risiko ketidakkonsistenan kebijakan yang merusak efektivitas dan keberlanjutan pemanfaatan IDM, sehingga diperlukan penguatan sinergi dan pengelolaan data yang lebih matang dan terstruktur.

IDM kurang memiliki mekanisme pengawasan dan insentif yang efektif untuk memacu perubahan progresif desa. Walaupun IDM dapat menjadi gambaran kemajuan desa, tanpa dukungan kapasitas, penguatan kelembagaan, dan pendekatan pembangunan yang kontekstual, keberadaan IDM bisa saja bersifat prosedural saja, tanpa membawa desa ke tingkat yang lebih maju secara substantif.

IDM berakar pada ketidaksesuaian antara kebutuhan nyata desa yang sangat beragam dan kompleks dengan pendekatan pengukuran yang sangat teknis, normatif, dan kuantitatif. Kreativitas pembangunan desa yang berfokus pada konteks sosial-ekonomi dan budaya lokal sering tidak dapat ditangkap secara memadai oleh IDM. Oleh karena itu, IDM cenderung menjadi instrumen administratif yang kurang responsif terhadap keragaman dan dinamika desa.

Indeks Desa Membangun (IDM) sebagai instrumen evaluasi resmi telah menjadi formalitas administratif yang tidak diikuti oleh konsekuensi nyata, terutama karena ketidakadaan sanksi atau pengurangan Dana Desa bagi desa-desa yang mengabaikannya. Kepala desa tetap memilih untuk mendasarkan pembangunan pada kebutuhan lokal yang dianggap lebih mendesak dan relevan, menunjukkan bahwa kebijakan IDM sebenarnya tidak mampu memaksa atau mengarahkan pembangunan desa secara efektif. Ini mencerminkan kegagalan pemerintah dalam menerapkan mekanisme pengawasan dan insentif yang kuat yang dibutuhkan untuk menjadikan IDM sebagai alat yang efektif dalam pembangunan desa.

Kondisi ini menunjukkan bahwa pemerintah terlalu mengandalkan pendekatan normatif yang hanya berfokus pada pengukuran kuantitatif tanpa memperhatikan konteks dan dinamika sosial-ekonomi lokal desa. Pendekatan seperti ini tidak hanya melemahkan fungsi IDM sebagai penggerak perubahan, tetapi juga memperlihatkan lemahnya tata kelola pembangunan desa yang substansial dan mampu memberikan dampak signifikan pada kemajuan desa. Kritik tajam ini menuntut pemerintah untuk mengkaji ulang penggunaan IDM dan memperbaiki kebijakan dengan mengedepankan mekanisme yang lebih nyata dan berorientasi pada keadilan serta efektivitas pembangunan di tingkat desa.

## 5.2 Implikasi

Implikasi dari situasi ini adalah pembangunan desa di Kebumen yang rentan ketidakefektifan, karena pembatasan IDM pada indikator kuantitatif yang kaku dan lemahnya sinergi antar lembaga menyebabkan kebijakan dan alokasi sumber daya tidak tepat sasaran. Konflik sosial-politik berpotensi meningkat seiring dengan menurunnya kapasitas desa untuk mandiri dan mempertahankan keberagaman lokal. Dengan demikian, penerapan *governmentality* melalui IDM pada pemerintah desa di Kabupaten Kebumen menunjukkan pola kontrol dan resistensi yang kompleks, yang memerlukan perhatian serius bagi evaluasi dan penyempurnaan kebijakan pembangunan desa agar menjadi lebih inklusif, adaptif, dan berkelanjutan.

IDM secara nyata memperkuat dominasi birokrasi sentralistik yang mengurangi peran otonomi desa dan ruang bagi partisipasi masyarakat lokal. Desa tidak dipandang sebagai entitas yang unik dengan potensi dan kapasitas berbeda-beda, tetapi justru dijadikan objek administratif yang harus maupun sukarela untuk tunduk pada standar yang seragam dan homogen. Paradigma demikian mengabaikan keragaman sosial-ekonomi dan kapasitas desa, sehingga kebijakan yang dihasilkan menjadi tidak responsif terhadap kebutuhan riil masyarakat di tingkat desa.

Narasi ini menuntut refleksi kritis atas penggunaan IDM hanya sebagai alat ukur dan pengendali pembangunan desa, agar desa secara sukarela menjalankan apa yang menjadi rumusan IDM, alih-alih menjadi instrumen pemberdayaan dan inklusi, IDM dalam kerangka *governmentality* telah bertransformasi menjadi alat mekanistik yang mengukuhkan mekanisme kontrol administratif, menekan keberagaman, dan menggerus otonomi desa. Implikasi serius dari dinamika ini adalah perlunya reformulasi kebijakan dan praktik pengukuran pembangunan desa yang lebih adaptif, inklusif, dan kontekstual agar pembangunan desa mampu berjalan berkelanjutan dan adil tanpa meninggalkan kearifan lokal sesuai kebutuhan lokal yang tepat untuk mewujudkan masyarakat desa yang lebih sejahtera.

